

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2025-2029



RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2025-2029

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 ini merupakan salah satu bagian dari dokumen perencanaan Pembangunan di Kabupaten Karanganyar dan upaya untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029. Diharapkan melalui Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 ini arahan dan strategi pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dapat dilaksanakan secara sistematis dan menuju kepada Pencapaian yang lebih baik sesuai aturan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Untuk penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 ini kritik dan saran untuk perbaikan dan kesempurnaan dari semua pihak termasuk dari pemangku kepentingan (*Stakeholder*) sangat diharapkan. Semoga Renstra ini bermanfaat bagi peningkatan kinerja sumber daya manusia birokrasi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar, bermanfaat sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar. Semoga Renstra ini bermanfaat bagi kemajuan Kabupaten Karanganyar.

Karanganyar, September 2025
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KARANGANYAR

BAKDO HARSONO, S.STP., M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19780304 199703 1 003

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-3
1.4. Sistematika Penulisan	I-3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	II-1
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	II-13
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	III-1
3.1. Tujuan dan Sasaran	III-1
3.2. Strategi	III-3
3.3. Arah Kebijakan	III-4
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN...	IV-1
4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Penyelenggaraan Bidang Urusan	IV-1
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	IV-22
BAB V PENUTUP	V-1
5.1. Kesimpulan Substansial	V-1
5.2. Kaidah Pelaksanaan	V-1
5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi	V-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar.....	II-5
Tabel 2.2.	Jumlah Pegawai (PNS) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Menurut Golongan, Jenis Kelamin.....	II-5
Tabel 2.3.	Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Menurut Eselon dan Jenis Kelamin.....	II-6
Tabel 2.4.	Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Menurut Tingkat Pendidikan	II-6
Tabel 2.5.	Data Aset Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2024.....	II-6
Tabel 2.6.	Capaian Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024.....	II-8
Tabel 2.7.	Capaian Indikator Kinerja Kunci Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024.....	II-9
Tabel 2.8.	Capaian Indikator Program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-10
Tabel 2.9.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-11
Tabel 2.10.	Pemetaan Permasalahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar.....	II-13
Tabel 2.11.	Teknik merumuskan Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar	II-14
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029.....	III-2
Tabel 3.2.	Penahapan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 – 2029	III-3
Tabel 3.3.	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar	III-4
Tabel 3.4.	Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029	III-5
Tabel 4.1.	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah	IV-3
Tabel 4.2.	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar	IV-10
Tabel 4.3.	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029.....	IV-24
Tabel 4.4.	Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah.....	IV-24
Tabel 4.5.	Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029	IV-25
Tabel 4.6.	Indikator Kinerja Kunci Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029	IV-25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar.....	II-4
--	------

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029 merupakan bagian penting dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan transparan. Dokumen ini disusun sebagai panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan program serta sebagai bentuk sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan bidang pemerintahan urusan kesatuan bangsa dan politik.

Landasan hukum penyusunan Renstra ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan pentingnya dokumen perencanaan pembangunan terintegrasi untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Selain itu, Renstra ini juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa perangkat daerah harus menyusun dokumen perencanaan lima tahunan yang disebut dengan Renstra. Renstra perangkat daerah menjadi instrumen strategis lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas.

Penyusunan Renstra ini juga mengacu pada Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, serta penyelarasan antara Renstra perangkat daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam hal ini, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029 akan menjadi penjabaran teknis visi dan misi kepala daerah terpilih, hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, yang dituangkan dalam RPJMD.

Dalam penyusunannya, Renstra ini mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2020–2024, kondisi eksisting, serta tantangan dan peluang yang dihadapi ke depan. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029 juga diselaraskan dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen ini diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, berdaya saing, dan berbasis teknologi informasi.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Nomor 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 168);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 181).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 adalah untuk menyusun visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan lima tahunan Satpol PP sebagai panduan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi tugas pokok dan fungsinya dalam menegakkan peraturan daerah, menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta memberikan perlindungan masyarakat, demi mencapai kinerja yang lebih baik dan responsif terhadap tuntutan lingkungan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar.
3. Memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar yang memuat program dan kegiatan.

1.4. Sistematika

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, menguraikan Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, menguraikan tentang Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, menguraikan tentang tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah.

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN,** menguraikan
tentang Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, Indikator
Kinerja Utama (IKU), dan Indikator Kinerja Kundi (IKK).

BAB V BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dinyatakan : Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada huruf e yaitu pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.

Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dijabarkan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar adalah

1. Kepala Satuan;
2. Sekretaris;
3. Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
4. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
5. Bidang Pemadaman Kebakaran; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 108 Tahun 2021 tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sampai dengan satu eselon dibawah kepala dinas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Satuan

Kepala Satuan membantu Bupati menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Kepala Satuan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan administrasi Satpol PP; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, asset, kerumahtanggaan, Kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan kepegawaian, pelayanan administrasi. Sekretaris dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian kegiatan;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- d. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/ jasa;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan fungsinya.

Sub bagian umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, hukum, kehumasan, ketatalaksanaan, keorganisasian, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi Satpol PP.

3. Bidang Penegakan Peraturan Daerah

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penegakkan Peraturan Daerah. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan dan penindakan Peraturan Daerah;
- b. Pelaksana kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan dan penindakan Peraturan Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan, pengawasan dan penindakan Peraturan Daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah.

Kepala Seksi Penindakan melakukan tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penegakan.

4. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang operasional, pengendalian dan penanganan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang operasional, pengendalian dan penanganan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
3. Pemantauan dan evaluasi di bidang operasional, pengendalian dan penanganan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
4. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan operasional dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum.

Kepala Seksi Penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penanganan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

5. Bidang Pemadam Kebakaran

Kepala Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pemadam Kebakaran. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pemadam kebakaran;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemadam kebakaran;
3. Pemantauan dan evaluasi di bidang pemadam kebakaran; dan
4. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

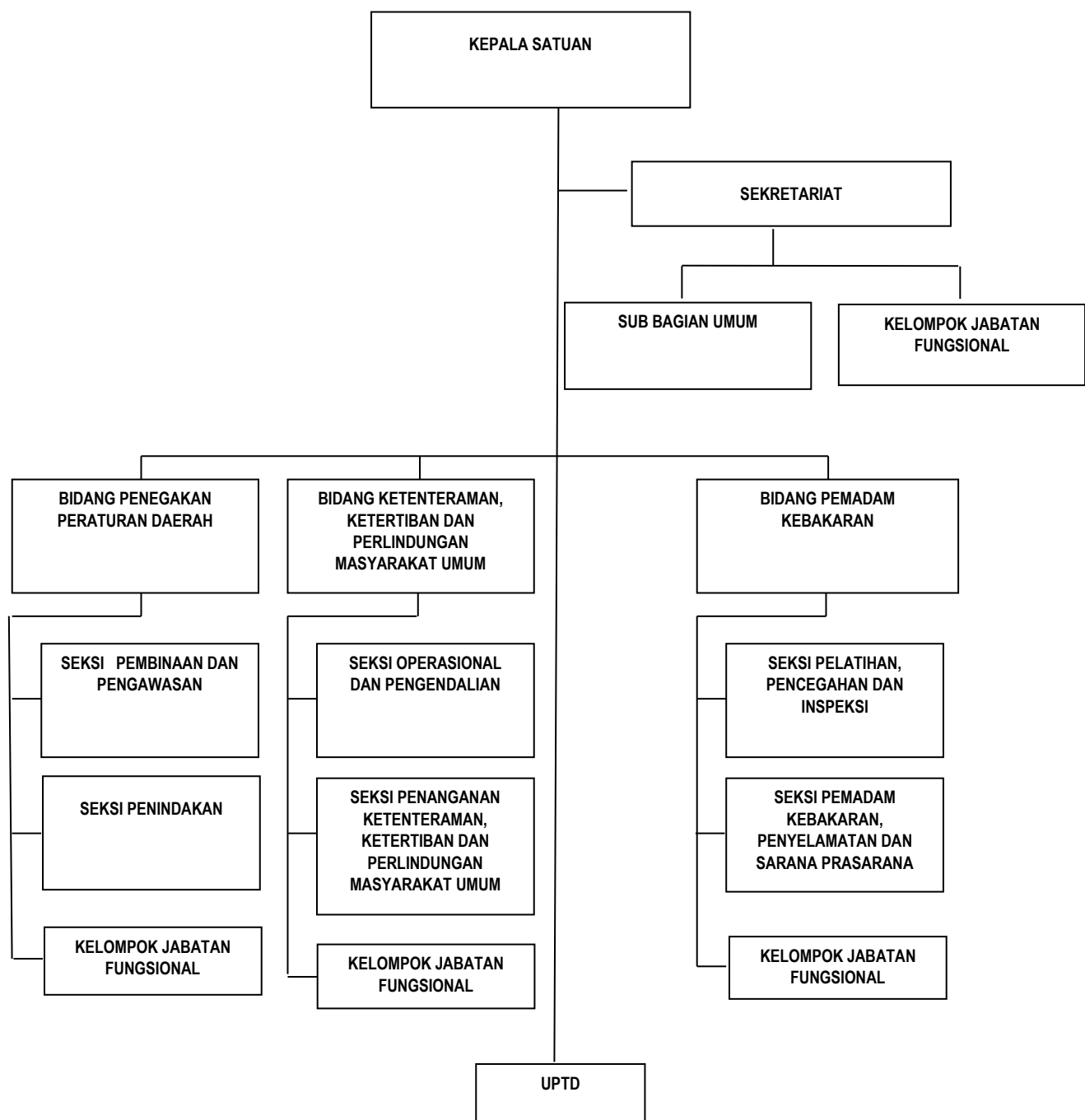
Kepala Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pemadam kebakaran, penyelamatan dan sarana prasarana.

Kepala Seksi Pelatihan, Pencegahan dan Inspeksi mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pelatihan, pencegahan dan Inspeksi.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Seksi/ Subbag dan atau Bidang/ Sekretaris sesuai jenis dan jenjang jabatannya yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1.
Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Karanganyar



2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik serta mendukung pencapaian agenda pembangunan daerah, perlu memiliki sumber daya manusia yang andal. Potensi SDM ini menjadi modal penting dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dinas tersebut.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar di dukung oleh beberapa sumber daya yang ada, di antaranya Sumber Daya Manusia. Dapat dilihat pada tabel 2.1 jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar sebanyak 40 Pegawai Negeri Sipil, 2 Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja dan 265 Tenaga Honorer.

Tabel 2.1.
Jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Karanganyar

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Persentase
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	40	13,09
2	Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja	2	0,65
3	Tenaga Honorer	265	86,31
Jumlah		307	100

Sumber : Satpol PP Kab Karanganyar Tahun 2024

Menurut formasi eselon jabatan struktural, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar memiliki 1 (satu) jabatan eselon II b yang diduduki oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, sekaligus jabatan Eselon tertinggi, 3 (tiga) jabatan eselon III b, 6 (enam) jabatan eselon IV a, 1 Pejabat Fungsional, 29 Staf dan 2 orang PPPK dan jabatan eselon tersebut masih ada kekosongan 2 jabatan.

Sedangkan menurut Pendidikan tertinggi yang ditamatkan, Pendidikan tertinggi yang ditamatkan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar yang berstatus PNS paling banyak tamatan SLTA sebanyak 25 orang, tamatan Strata-2 (S2) sebanyak 9 orang, tamatan Strata-1 (S1) sebanyak 5 orang, tamatan Diploma-III (D-III) sebanyak 2 orang dan tamatan SD sebanyak 1 orang.

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai (PNS) Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Karanganyar Menurut Golongan, Jenis Kelamin

No	Pangkat Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pembina Utama IVc	1	-	1
2	Pembina IV a	4	1	5
3	Penata Tingkat I/ III d	6	1	7
4	Penata / III c	1	-	1
5	Penata Muda Tingkat I/ III b	2		2
6	Penata Muda/ III a	3		3
7	Pengatur Tingkat I/ II d	11		11
8	Pengatur/ II c	6		6
9	Pengatur Muda Tingkat I/ II b	3		3
10	Pengatur Muda/ II a	1		1
11	P3K VII	2		2
	Jumlah	40	2	42

Sumber : Satpol PP Kab Karanganyar Tahun 2024

Tabel 2.3.
Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Karanganyar
Menurut Eselon dan Jenis Kelamin

No	Pangkat Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	IV	4	1	5
2	III	11	1	12
3	II	23		23
4	I	0	-	0
5	PPPK VII	2	-	2
Jumlah		40	2	42

Sumber : Satpol PP Kab Karanganyar Tahun 2024

Tabel 2.4.
Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Karanganyar
Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pasca Sarjana/ S2	8	1	9
2	Sarjana/ S1	4	1	5
3	Diploma-III/ D-III	2		2
4	SLTA	25		25
5	SLTP	-		0
6	SD	1		1
Jumlah		40	2	42

Sumber : Satpol PP Kab Karanganyar Tahun 2024

2. Sarana dan Prasarana

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan dan program perlu dukungan sarana dan prasarana yang memadai, demikian pula pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dalam mengoptimalkan kinerja maka di butuhkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kinerja petugas di lapangan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5.
Data Aset Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Karanganyar

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	Truk	1	Baik	
2	Mobil	11	Baik	
3	Sepeda Motor	12	Baik	
4	Sepeda	2	Baik	
5	Mobil Pemadam	3	Baik	
6	AC	9	Baik	
7	Alat Komunikasi Radio	1	Baik	
8	Alat Pemadam	56	Baik	
9	Almari Besi	12	Baik	
10	Camera	11	Baik	
11	Brankas	1	Baik	
12	Dispenser	4	Baik	
13	Chain Saw	1	Baik	

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi	Keterangan
14	Detektor Kebakaran	1	Baik	
15	Filling Besi/ Metal	8	Baik	
16	Kipas Angin	7	Baik	
17	HT	102	Baik	
18	Hidran Kebakaran	1	Baik	
19	Kursi Kayu/ Rotan	26	Baik	
20	Kursi Putar	5	Baik	
21	Kursi Lipat	6	Baik	
22	Kursi Kerja Pejabat	3	Baik	
23	Kursi Rapat Pejabat	50	Baik	
24	Lemari Kayu	5	Baik	
25	Lemari Es	2	Baik	
26	Laptop	13	Baik	
27	Lonceng Kebakaran	1	Baik	
28	Megaphone	2	Baik	
29	Meja Kerja Pejabat	28	Baik	
30	Meja Rapat	12	Baik	
31	PC Unit	17	Baik	
32	Note Book	3	Baik	
33	Printer	15	Baik	
34	Tameng	20	Baik	
35	Pentung	10	Baik	
36	Televisi	3	Baik	
37	Topeng (Masker) Oksigen	1	Rusak Berat	
38	Tred Mill	1	Baik	
39	Mesin Fotocopy	1	Baik	
40	Penghancur Kertas	1	Baik	
41	Tempat Tidur Besi	15	Baik	
42	Ex House	2	Baik	
43	Mimbar	1	Baik	
44	Sound System	1	Baik	
45	LED	1	Baik	
46	Repeater	1	Baik	
47	Telephone	1	Baik	

Sumber : Satpol PP Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar merupakan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar yang mempunyai tugas pokok Membantu Bupati dalam melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum yang menjadi kewenangan daerah.

Tabel 2.6.
Capaian Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Renstra Perangkat Daerah					Persentase Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai SAKIP OPD	Nilai	65	74	75	76	88	72,63	75,18	70,70	70,75	74,20	111,73	101,59	94,27	93,09	84,31
2	Respon time penanganan kebakaran	%	47,6	48	48,3	48,8	48,8	60,71	72,04	52,6	57,47	69,4	127,5	150	108,9	117,7	142,2
3	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	35	36	36,5	37	37,5	35	36	36,5	37	38	100,00	100,00	100,00	100,00	101,3

Sumber : Satpol PP Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

Tabel 2.7.
Capaian Indikator Kinerja Kunci Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Renstra Perangkat Daerah					Persentase Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Waktu tanggap (<i>respon time</i>) penanganan kebakaran	menit	15	15	15	15	15	15	13,49	14,46	12,73	11,02	100	100	100	100	100

Sumber : Satpol PP Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

Tabel 2.8.
Capaian Indikator Program Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024

No	Program	Indikator	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Renstra Perangkat Daerah					Persentase Capaian Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentrman Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Satpol PP Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

Tabel 2.9.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024

No	Uraian	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Renstra Perangkat Daerah					Persentase Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.102.492.000	6.746.566.000	6.302.048.150	6.149.282.544	6.479.724.907	6.759.441.636	6.485.502.157	5.661.820.115	5.801.183.393	6.218.976.308	95,17	96,13	89,94	94,33	95,97
2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9.990.351.000	14.428.631.000	6.399.020.400	5.794.988.200	7.758.172.482	9.106.204.936	12.055.427.500	5.910.273.900	5.329.537.900	7.521.673.648	91,15	83,55	92,36	91,96	96,95
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	440.000.000	785.000.000	949.320.000	1.088.914.000	1.129.898.200	438.900.000	783.507.100	938.995.400	1.087.482.300	1.114.533.500	99,75	99,80	98,91	99,86	98,64

Sumber : Satpol PP Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

2.1.4. Kelompok sasaran layanan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan di bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum. Kelompok sasaran layanan yaitu masyarakat di wilayah hukum Kabupaten Karanganyar. Setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda dan memiliki masalah yang berbeda, seperti maraknya pedagang kaki lima yang berjualan di sembarang tempat, masalah pengemis gelandangan, keberadaan warung remang-remang, peredaran minuman beralkohol dan lain sebagainya. Satpol PP pada hakikatnya memberikan perlindungan kepada masyarakat, sehingga dapat terwujud rasa tenteram dan tertib di tengah-tengah masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya SatPol PP memiliki kewenangan melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Peraturan Kepala Daerah, mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Selanjutnya melakukan tindakan penyelidikan dan tindakan administratif. Penertiban dilakukan dengan cara Persuasif dan Humanis agar tidak ada benturan fisik antara aparat dan masyarakat yang ditertibkan.

2.1.5. Mitra perangkat daerah

Mitra Satpol PP Kabupaten Karanganyar terdiri dari berbagai instansi dan lembaga yang berperan dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, antara lain :

1. Instansi Pemerintah Daerah
 - a) Dinas Sosial
Untuk penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), gelandangan, dan pengemis.
 - b) Dinas Perhubungan
Dalam penertiban parkir liar dan pelanggaran lalu lintas di wilayah kota.
 - c) Dinas Lingkungan Hidup
Terkait penertiban lingkungan dan kebersihan.
 - d) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Dalam penanganan bencana seperti kebakaran, banjir, gempa dan evakuasi warga.
 - e) Dinas Kesehatan
 - Dalam penanganan gangguan ketertiban terkait kesehatan masyarakat (misalnya penertiban PKL di area rumah sakit).
 - Koordinasi dalam penertiban sarana kesehatan dan penegakan protokol kesehatan
 - f) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - Penertiban usaha tanpa izin.
 - Penegakan Perda tentang izin bangunan dan izin usaha.
 - Pemeriksaan lokasi usaha terkait pelanggaran.
2. Aparat Penegak Hukum
TNI dan Polri dalam pengamanan aksi unjuk rasa, razia, dan operasi hukum dan dukungan pada kegiatan patroli dan penertiban bersama.
3. Kelurahan/RT/RW
Dalam pendekatan berbasis masyarakat untuk menjaga ketertiban umum dan ketenteraman di lingkungan permukiman.

4. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Komunitas
 Dalam program penyuluhan, edukasi masyarakat, serta advokasi hukum atau sosial.
5. Media Massa
 Sebagai mitra dalam publikasi kegiatan, edukasi, dan sosialisasi program-program Satpol PP.
6. Masyarakat dan Relawan
 Masyarakat dapat menjadi mitra aktif dalam melaporkan pelanggaran atau berpartisipasi dalam program kemasyarakatan seperti gotong royong dan patroli lingkungan.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar, meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan, serta ketatalaksanaan, merupakan faktor kunci keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Keberhasilan ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar. Dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis, optimalisasi sumber daya menjadi kebutuhan utama agar setiap target pembangunan dapat tercapai dengan baik.

Berdasarkan evaluasi capaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar selama lima tahun terakhir, beberapa permasalahan utama dapat diidentifikasi. Permasalahan tersebut menjadi fokus penting dalam meningkatkan kinerja pelayanan organisasi ke depan, yaitu :

Tabel 2.10.
Pemetaan Permasalahan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Karanganyar

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya stabilitas keamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	Kurangnya penanganan pelanggaran Perda yang ditegakkan	Kapasitas SDM yang masih kurang kualitas serta pemenuhan peningkatan kapasitas terhadap SDM
		Kurangnya penegakan atas angka kriminalitas yang masih tinggi, gangguan ketertiban dalam masyarakat, antara lain disebabkan oleh kejahatan, pelanggaran hukum dan keterbatasan petugas serta kesadaran hukum masih rendah	• Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pendukung terciptanya pemahaman peraturan perundang-undangan; • Kapasitas SDM yang perlu ditingkatkan.

2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah situasi yang memiliki potensi menjadi tantangan atau peluang bagi suatu daerah di masa mendatang. Dalam konteks Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar, isu-isu strategis berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Isu-isu ini mencerminkan aspek-aspek yang perlu mendapat perhatian khusus untuk meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar serta mendukung pembangunan daerah yang lebih baik. Isu strategis tidak hanya didasarkan pada hasil analisis data yang menggambarkan permasalahan yang dihadapi, tetapi juga dengan memperhatikan potensi, isu KLHS, global, nasional, regional dan daerah.

Tabel 2.11.
Teknik Merumuskan Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Karanganyar

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional (RPJMD Prov Jateng 2025-2029)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
▪ Peran masyarakat dalam Penegakan Peraturan Daerah ▪ Adanya fasilitasi dan koordinasi dari instansi vertikal ▪ Berkembangnya partisipasi masyarakat dalam penanganan kasus kebakaran	• Kurangnya penanganan pelanggaran Perda yang ditegakkan • Kurangnya penegakan atas angka kriminalitas yang masih tinggi, gangguan ketertiban dalam masyarakat, antara lain disebabkan oleh kejahatan, pelanggaran hukum dan keterbatasan petugas serta kesadaran hukum masih rendah	• Pemanfaatan SDA dan ruang secara besar-besaran (alih fungsi lahan) • Pencemaran lingkungan (limbah industri, limbah domestik) • Persampahan • Perubahan iklim dan resiko bencana	Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan	Isu supremasi hukum, demokrasi substansial, keamanan nasional, stabilitas ekonomi, diplomasi tangguh	Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat	▪ Belum optimalnya penegakan peraturan daerah; ▪ Belum optimalnya penanganan kebakaran; ▪ Masih adanya gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan ; ▪ Masih adanya kriminalitas dan gangguan ketertiban dalam masyarakat .

BAB III

TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Visi Bupati Karanganyar yang terpilih periode 2025-2029 adalah “SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi Intanpari yang Berintegritas, Berdaya Saing, dan Sejahtera, didukung oleh lima misi yang telah dirumuskan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar berkontribusi pada misi kelima (Ke-5), yaitu **“Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama”**. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang harus dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu lima tahun ke depan (2025-2029).

Tujuan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut **“Terwujudnya penegakan perda dan perkara, kualitas penanganan kebakaran”**. Sedangkan sasaran jangka menengah **“Meningkatnya kualitas penanganan penegakan perda dan perkara, penanganan kebakaran dan Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Dae”**

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar sebagaimana disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029

NSPK TUJUAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-						Ket.
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Misi ke-5 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, konduktivitas wilayah Sasaran 3 : Meningkatnya konduktivitas, kerukunan antar umat beragama dan demokratisasi	Terwujudnya penegakan perda dan perkada, kualitas penanganan kebakaran		Persentase Penurunan gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat	Jumlah Gangguan Tahun sebelumnya (n-1) - Jumlah Gangguan Tahun Sekarang (n) dibagi jumlah Gangguan Tahun Sebelumnya (n) dikali 100%	%	0	0,5	1,0	1,1	1,2	1,3	1,3	
		Meningkatnya kualitas penanganan penegakan perda dan perkada, penanganan kebakaran	Indeks pencapaian SPM Trantibumlinmas	SPM yang tercapai dibagi total SPM yang ada dikali 100%	Indeks	100	100	100	100	100	100	100	
			Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Pemadam Kebakaran dan penyelamatan atau perangkat daerah ditambah Jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau dibawah pembinaan DIBAGI Jumlah Kejadian Kebakaran DIKALI 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,15	82	82,1	82,2	82,3	82,4	82,5	

Agenda pembangunan pada Satuan Polisi Pamong Praja dibagi dalam lima tahapan pembangunan. Pembagian tahapan ini dimaksudkan agar dalam menyusun target dalam mencapai prioritas pembangunan dapat lebih realistis dan dapat terlihat ukuran capaian setiap periodenya. Selain itu, tahapan disusun agar Satuan Polisi Pamong Praja dapat menyesuaikan dengan kondisi sumber daya (anggaran, SDM, infrastruktur) yang terbatas, sehingga perlu prioritas bertahap, bukan sekaligus.

Adapun tahapan pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi dan Pamong Praja selama periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Penahapan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penguatan internalisasi Penegakan Perda dan Penanganan Kebakaran	Peningkatan peran seta pemerintah daerah, aparat penegak Perda dan Penanganan Kebakaran	Optimalisasi Penanganan Pelanggaran Perda	Peningkatan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas pelayanan perangkat daerah	Menjaga Kondusivitas Wilayah

3.2. Strategi

Analisis lingkungan internal dan eksternal memiliki peran penting dalam perencanaan strategis, karena memberikan dasar yang kuat untuk merumuskan strategi yang sesuai dengan kondisi yang ada. Dari hasil analisis ini, langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan atau sasaran dituangkan dalam kebijakan. Kebijakan tersebut berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik, terkoordinasi, dan mendukung pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Strategi ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran kelembagaan, meningkatkan efektivitas program, serta mendukung pencapaian visi pembangunan daerah. Berikut adalah strategi utama yang disusun:

1. Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan kapabel melalui peningkatan akuntabilitas, kinerja perangkat daerah, meningkatkan kualitas pengawasan, kualitas SPIP, penguatan kualitas pengelolaan keuangan, peningkatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan kualitas pegawai, kompetensi ASN, peningkatan kedisiplinan ASN, penataan kelembagaan, meningkatkan kualitas tata kelola SPBE, memperkuat jaringan komunikasi, meningkatkan kualitas satu data, meningkatkan keamanan informasi daerah, meningkatkan kualitas arsip daerah;
2. Meningkatkan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas pelayanan perangkat daerah; dan
3. Meningkatkan pencegahan dan pengurangan terjadinya konflik sosial melalui peningkatan kerukunan antar umat beragama, etnis, peningkatan cinta tanah air, penguatan

kelembagaan politik, peningkatan keamanan dan ketertiban umum.

3.3. Arah kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang harus diikuti dalam pelaksanaan strategi untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil terarah dan konsisten dalam mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Kebijakan ini memberikan panduan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar, agar setiap langkah strategis yang diambil dapat mendukung visi pembangunan daerah secara efektif. Perumusan arah kebijakan pembangunan pada Satuan Polisi dan Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dengan memperhatikan Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029 dan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang melekat pada Satuan Polisi dan Pamong Praja Kabupaten Karanganyar. Rumusan arah kebijakan selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Karanganyar

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
	1. Menjadi acuan bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, seperti perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum; 2. Menetapkan standar pelayanan minimal (SPM) yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. 3. Menjadi dasar dalam menegakkan Perda dan Perkada, sehingga tercipta penegakan yang seragam dan sesuai aturan.	Peningkatan kondusivitas wilayah dengan peningkatan toleransi, kerukunan antar umat beragama dan pemahaman wawasan kebangsaan	• Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan melayani melalui peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan, kualitas ASN, implementasi Satu Data dan <i>Electronic Government</i> (E-Gov) dan keamanan informasi daerah; • Peningkatan keamanan lingkungan dengan mengutamakan pencegahan ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat; • Peningkatan reformasi birokrasi yang akuntabel dan kapabel melalui perwujudan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan, kualitas kompetensi ASN, kualitas satu data, keamanan	

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
	4. Membantu dalam peningkatan kapasitas anggota Satpol PP agar memahami dasar hukum, tugas, dan fungsi mereka secara mendalam, termasuk penyesuaian dengan perkembangan zaman dan digitalisasi, seperti yang disebutkan dalam acara peningkatan kapasitas SDM Satpol PP. 5. Memberikan kerangka bagi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal, termasuk penegakan Kode Etik Pol PP, melalui unit seperti Petugas Tindak Internal (PTI)		informasi daerah dan kabupaten pintar (smart city)	

Keterkaitan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, Renstra Satuan Polisi dan Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dengan visi dan misi RPJMD Karanganyar tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4.
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029

Visi RPJMD	“SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi Intanpari yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera		
Misi RPJMD	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama		
Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi PD	Arah Kebijakan PD
Terwujudnya penegakan perda dan perkara, kualitas penanganan kebakaran	1. Meningkatkan kualitas penanganan penegakan perda dan perkara,	Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan kapabel melalui peningkatan akuntabilitas, kinerja perangkat daerah, meningkatkan kualitas	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan melayani melalui peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran

Visi RPJMD	“SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi Intanpari yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera		
Misi RPJMD	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama		
Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi PD	Arah Kebijakan PD
	penanganan kebakaran 2. Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	pengawasan, kualitas SPIP, penguatan kualitas pengelolaan keuangan, peningkatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan kualitas pegawai, kompetensi ASN, peningkatan kedisiplinan ASN, penataan kelembagaan, meningkatkan kualitas tata kelola SPBE, memperkuat jaringan komunikasi, meningkatkan kualitas satu data, meningkatkan keamanan informasi daerah, meningkatkan kualitas arsip daerah; • Meningkatkan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas pelayanan perangkat daerah; dan • Meningkatkan pencegahan dan pengurangan terjadinya konflik sosial melalui peningkatan kerukunan antar umat beragama, etnis, peningkatan cinta tanah air, penguatan kelembagaan politik, peningkatan keamanan dan ketertiban umum	dan pelaporan, kualitas ASN, implementasi Satu Data dan Electronic Government (E-Gov) dan keamanan informasi daerah; • Peningkatan keamanan lingkungan dengan mengutamakan pencegahan ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat; • Peningkatan reformasi birokrasi yang akuntabel dan kapabel melalui perwujudan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan, kualitas kompetensi ASN, kualitas satu data, keamanan informasi daerah dan kabupaten pintar (<i>smart city</i>)

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Penyelenggaraan Bidang Urusan

Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraikan sebagai berikut:

A. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota;
Sub Kegiatan :
 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota;
 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan;
 - Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota;
Sub Kegiatan :
 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

B. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

1. Kegiatan : Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota;
Sub Kegiatan :
 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota;
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri;
2. Kegiatan : Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran;
Sub Kegiatan :
 - Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran;
3. Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran;
Sub Kegiatan :

- Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran;
- 4. Kegiatan : Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia;
Sub Kegiatan :
 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan dan/ atau Mengancam Keselamatan Manusia;
 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi;
 - Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi;
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi.

C. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evakuasi Kinerja Perangkat Daerah;
Sub Kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
3. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah;
Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
4. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Renstra Perangkat Daerah

NSPK TUJUAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
TJ 2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, kondusivitas wilayah	Terwujudnya penegakan perda dan perkara, kualitas penangananna kebakaran				T1 : Presentase Penurunan gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat		
S3 : Meningkatnya kondusivitas, kerukunan antar umat beragama dan demokratisasi		S3. 1 : Meningkatnya kualitas penanganan penegakan perda dan perkara, penanganan kebakaran	Kondisi Masyarakat yang aman dan tentram	Pelanggaran Perda dan Perkada dapat diminimalisir	S1.1: Indeks Pencapaian SPM Trantibumlinmas		
					Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
					Presentase penegakkan perda dan perkara yang ditegakkan		
					Presentase Linmas yang dibina		
					Presentase tertanganinya kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Kegiatan: Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	

NSPK TUJUAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
						Sub Kegiatan: Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan: Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
						Sub Kegiatan: Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	
						Sub Kegiatan: Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
						Sub Kegiatan : Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
						Sub Kegiatan: Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	
					Meningkatnya Penegakan Perda	Kegiatan: Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
						Sub Kegiatan: Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

NSPK TUJUAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
						Sub Kegiatan: Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					S1.2: Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan dan evakuasi korban kebakaran		
					Waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
					Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Kegiatan: Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan: Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
					Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran yang Dilaksanakan Sesuai Jadwal	Kegiatan: Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	

NSPK TUJUAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
						Sub Kegiatan: Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	
					Persentase Masyarakat yang Terlibat dalam Kegiatan Pencegahan Kebakaran	Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
						Sub Kegiatan: Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	
						Kegiatan : Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	
						Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Perrtolongan pada Peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/ atau mengancam keselamatan manusia	
						Sub Kegiatan : Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	

NSPK TUJUAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
						Sub Kegiatan : Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	
						Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	
		S1.2 : Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah			S1.2 : Indeks Kepuasan Masyarakat		
					Nilai SAKIP OPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Presentase tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	

NSPK TUJUAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					Capaian Realisasi Anggaran OPD	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
						Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Sub Kegiatan: Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Sub Kegiatan: Pengadaan Mebel	

NSPK TUJUAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
						Sub Kegiatan: Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Persentase tersedianya jasa penunjang pemerintah daerah	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Presentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Tabel 4.2.
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar

TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
							TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		Tahun 2030	
							Targ et	Rp	Targe t	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp
Terwujudnya penegakan perda dan perkara, kualitas penanganan kebakaran		Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat			%	0	0		1,0		1,1		1,2		1,3		1,3	
	Meningkatnya kualitas penanganan penegakan perda dan perkara, penanganan kebakaran	Indeks pencapaian SPM Trantibumli nmas			Indeks	100	100		100		100		100		100		100	
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	%	90		4.906.083.350		4.472.093.127		4.075.695.100		4.075.695.100		4.075.695.100		4.075.695.100
				Persentase Perda dan Perkara yang ditegakkan	%	14,28	100		100		100		100		100		100	
				Presentase Linmas yang dibina	%	0,15	0,11		0,11		0,12		0,08		0,12		0,09	

TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
							TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		Tahun 2030	
							Targ et	Rp	Targe t	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp
			Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase tertanganin ya kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	4.070.000.000	100	3.775.469.127	100	3.417.695.100	100	3.417.695.100	100	3.417.695.100	100	3.417.695.100
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Dokumen	1	1	175.000.000	1	100.000.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	2	1	150.000.000	1	76.398.027	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000

TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
							TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		Tahun 2030	
							Targ et	Rp	Targe t	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp
			Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Laporan	12	12	3.400.000.000	12	3.399.071.100	12	3.382.695.100	12	3.382.695.100	12	3.382.695.100	12	3.382.695.100
			Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan	1	1	75.000.000	1	50.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000

TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
							TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		Tahun 2030	
							Targ et	Rp	Targe t	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp
			Pengadaan dan Pemeliharaaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	25	5	20.000.000	20	75.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	Orang	200	200	250.000.000	35	75.000.000	35	10.000.000	35	10.000.000	35	10.000.000	35	10.000.000
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Meningkatnya Penegakan Perda	%	100	100	836.083.350	100	696.624.000	100	658.000.000	100	658.000.000	100	658.000.000	100	658.000.000
			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	1	1	176.083.350	1	50.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
			Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan	Laporan	12	12	660.000.000	12	646.624.000	12	648.000.000	12	648.000.000	12	648.000.000	12	648.000.000

TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
							TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		Tahun 2030	
							Targ et	Rp	Targe t	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp
				Peraturan Kepala Daerah sesuai SOP														
		Jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			%	100	100		100		100		100		100		100	
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran	%	11.2	15	899.736.550	15	933.150.000	15	933.150.000	15	933.150.000	15	933.150.000	15	933.150.000
			Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganannya Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Daerah	Persentase terciptanya lingkungan kerja yang aman dan terlindungi, berkurangnya risiko insiden, penanganannya dampak kerusakan dan cedera yang	%	100	100	851.000.000	100	855.650.000	100	855.650.000	100	855.650.000	100	855.650.000	100	855.650.000

TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
							TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		Tahun 2030	
							Targ et	Rp	Targe t	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp
			Kabupaten/ Kota	minimal, serta pemulihan kondiis yang cepat														
			Pemadaman dan Pengendalia n Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Laporan	12	12	844.736.550	12	845.650.000	12	845.650.000	12	845.650.000	12	845.650.000	12	845.650.000
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulan gan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulan gan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknsi Terkait	Unit	1	1	5.000.000	2	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Presentase kejadian kebakaran yang di investigasi	%	100	100	5.000.000	100	7.500.000	100	7.500.000	100	7.500.000	100	7.500.000	100	7.500.000

TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
							TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		Tahun 2030	
							Targ et	Rp	Targe t	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp
			Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang memuat data bangunan/ gedung/ lingkungan yang memenuhi kelaikan standar sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokume n	1	1	5.000.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000
			Pemberdaya an Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase peningkatan kesadaran dan pengetahua n masyarakat tentang bahaya kebakaran serta peningkatan keterampilan dan kemampuan mereka dalam memadamk an api ringan dan melakukan tindakan pencegahan	%	100	100	5.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000

TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
							TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		Tahun 2030	
							Targ et	Rp	Targe t	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp
			Pembentuk an dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/ Kelurahan yang terbentuk dan terbina relawan pemadam kebakaran pada lingkup sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) setiap tahunnya	Desa/ Kelurahan	1	1	5.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
			Penyelengga raan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahaya kan Manusia	Persentase Ketersediaa n Standarisasi Sarana dan Prasarana yang mendukung operasi tersebut	%	100	100	40.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000
			Penyelenggar aan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang menimpa, membahaya kan, dan/ atau mengancam keselamatan manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggar aan Operasi Penyelamata n yang mengancam keselamatan manusia	Laporan	1	1	5.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000

TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
							TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		Tahun 2030	
							Targ et	Rp	Targe t	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp
			Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang memuat kajian kebutuhan jenis sarana dan prasarana untuk pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi yang sesuai standar	Dokumen	1	1	5.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
			Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Laporan	1	1	5.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000

TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
							TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		Tahun 2030	
							Targ et	Rp	Targe t	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Unit	1	1	5.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM			Nilai	81,15	82		82,1		82,2		82,3		82,4		82,5	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai SAKIP OPD	Nilai	74,2	74,25	7.294.153.009	74,3	7.322.417.809	74,5	7.322.417.809	74,6	7.322.417.809	74,9	7.322.417.809	75	7.322.417.809
			Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	100	100	5.212.000	100	5.212.000	100	5.212.000	100	5.212.000	100	5.212.000	100	5.212.000

TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
							TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		Tahun 2030	
							Targ et	Rp	Targe t	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah	Dokume n	2	2	2.606.000	2	2.606.000	2	2.606.000	2	2.606.000	2	2.606.000	2	2.606.000
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokume n	2	2	2.606.000	2	2.606.000	2	2.606.000	2	2.606.000	2	2.606.000	2	2.606.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Realisasi Anggaran OPD	%	100	100	6.723.129.709	100	6.723.129.709	100	6.723.129.709	100	6.723.129.709	100	6.723.129.709	100	6.723.129.709
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	48	52	6.723.129.709	56	6.723.129.709	56	6.723.129.709	56	6.723.129.709	56	6.723.129.709	56	6.723.129.709
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah	%	-	-	-	100	150.000.000	-	-	100	150.000.000	-	-	100	150.000.000
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Stel	-	-	-	312	150.000.000	-	-	312	150.000.000	-	-	312	150.000.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	%	100	100	115.982.300	100	116.606.100	100	116.606.100	100	116.606.100	100	116.606.100	100	116.606.100

TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
							TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		Tahun 2030	
							Targ et	Rp	Targe t	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	1.028.100	1	1.028.100	1	1.028.100	1	1.028.100	1	1.028.100	1	1.028.100
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	1	32.000.000	1	32.623.800	1	32.623.800	1	32.623.800	1	32.623.800	1	32.623.800
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	1	12.500.000	1	12.500.000	1	12.500.000	1	12.500.000	1	12.500.000	1	12.500.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	70.454.200	12	70.454.200	12	70.454.200	12	70.454.200	12	70.454.200	12	70.454.200
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	184.500.000	100	184.500.000	100	184.500.000	100	184.500.000	100	184.500.000	100	184.500.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000

TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
							TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		Tahun 2030	
							Targ et	Rp	Targe t	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	12	34.500.000	12	34.500.000	12	34.500.000	12	34.500.000	12	34.500.000	12	34.500.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase terpeliharaan ya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	265.329.000	100	142.970.000	100	292.970.000	100	142.970.000	100	292.970.000	100	142.970.000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	30	30	248.829.000	30	126.470.000	30	276.470.000	30	126.470.000	30	276.470.000	30	126.470.000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	10	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	1	6.500.000	1	6.500.000	1	6.500.000	1	6.500.000	1	6.500.000	1	6.500.000

TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
							TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		Tahun 2030	
							Targ et	Rp	Targe t	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp
			Bangunan Lainnya	yang dipelihara/ direhabilitasi														

Tabel 4.3.
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			a. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Meningkatnya kesiapsiagaan dan respon cepat terhadap kejadian kebakaran dan non kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
			a. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	

Tabel 4.4
Daftar Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang mendukung Program
Prioritas Provinsi Jawa Tengah yang di delegasikan kepada
Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029

No	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan Kabupaten Karanganyar	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	Penguatan BPBD dan Tagana dalam Penanganan Bencana berbasis kelompok masyarakat	Mewujudkan ketahanan daerah terkait bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
2	Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana	Pembangunan desa mandiri dan mendorong kemampuan desa dalam menuju ketahanan pangan, desa tangguh bencana	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar tahun 2025-2029. Adapun IKU yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5.
Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Karanganyar Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase Penurunan gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat	%	0,5	1,0	1,1	1,2	1,3	1,3
2	Indeks pencapaian SPM Trantibumlinmas	Indeks	100	100	100	100	100	100
3	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100
4	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	82	82,1	82,2	82,3	82,4	82,5

2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja kunci Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar untuk melihat kinerja keberhasilan pada urusan kesatuan bangsa dan politik. Adapun indikator kinerja kunci yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6.
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Karanganyar

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100
7	Waktu tanggap bencana (<i>respon time</i>) penanganan kebakaran	Menit	11,02	15	15	15	15	15	15

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 - 2029.

5.1. Kesimpulan Substansial

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan strategis yang selaras dengan Visi dan Misi Bupati baru, khususnya dalam menurunkan potensi dan kejadian konflik sosial yang ada di Kabupaten Karanganyar.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini dapat direalisasikan bila ada kesepahaman dan komitmen bersama untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program/kegiatan yang telah direncanakan lima tahun kedepan. Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra ini akan sangat bergantung pada komitmen seluruh ASN, dukungan pimpinan daerah, serta sinergi dengan berbagai pihak terkait.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 yang perlu diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2029. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar wajib berpedoman pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Karanganyar. Diharapkan Renstra ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan semangat dedikasi, loyalitas dan pengabdian dari seluruh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi akan dilaksanakan secara periodik (triwulanan dan tahunan) untuk memantau capaian kinerja dan mengidentifikasi kendala pelaksanaan. Hasil evaluasi akan menjadi dasar untuk perumusan kebijakan, penyesuaian strategi, dan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan ASN. Laporan capaian kinerja akan disampaikan kepada Bupati dan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen Renstra SatPol PP menjadi dasar dalam penyusunan Manajemen Pengelolaan Risiko dengan melakukan analisis atas resiko penyebab dan dampak pada rencana strategis organisasi dan rencana operasional organisasi

Demikian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO



Telah dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
2. Kepala Baperlitbang	
3. Sekretaris Baperlitbang	
4. Kepala Bidang Sosial Budaya Baperlitbang	